



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0276/IPM/2019

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLASH
Alamat : JLN. ARTZIMAR III RT/RW. 003/005, KEL. TEGAL
GUNDIL-KEC. BOGOR UTARA KOTA BOGOR
Desa/Kelurahan : BANTARJATI
Kecamatan : BOGOR UTARA
Kabupaten/Kota : KOTA BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN TARBIYATUSSHIBYAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 3 MOCH. SYAIFUDIN, SH., M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0024386.AH.01.04. TAHUN 2015 TANGGAL 19
NOVEMBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	7	1	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 15 Juli 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1021 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLASH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Nomor B.2033.KK.10.17/II/PP.00/04/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0276/NDIPM/2019 tanggal 8 Juli 2019 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Ikhlash Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLASH KOTA BOGOR.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Juli 2019

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1021 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLASH
KOTA BOGOR**

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al-Ikhlash
2	Nomor Statistik Madrasah	101232710147
3	Alamat Madrasah	Jln. Artzimar III Rt/rw. 003/005, Kel. Tegal Gundil-Kec. Bogor Utara Kota Bogor Desa/Kelurahan Bantarjati Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tarbiyatusshibyan
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Moch. Syaifudin, SH., M.Kn No. 3 Tanggal 19 November 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0024386.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 19 November 2015



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

A. BUCHORI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR

Jalan Dr. Sumeru No. 25 Telp. (0251) 8325486; Faksimili (0251) 8352779; Bogor

BERITA ACARA SERAH TERIMA SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA MADRASAH TAHUN 2019

Pada hari Rabu tanggal 09 bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Bogor Jl. Sumeru No. 25 yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Hj. Marliyah, S.Pd**
NIP : **197002012003122003**
Jabatan : Kasi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bogor
Alamat : Jl. Sumeru No. 25 Kota Bogor

Selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"

- II. Nama : Nur Hasanah
NIP :
Jabatan : kepala Sekolah
Alamat : Azimar 3 Rt/Rw 003/005

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Ijin Operasional Lembaga Madrasah Tahun 2019, kepada **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Madrasah	Alamat	Nomor Ijop	Ket
	RA Al IKHLAS	Azimar 3 Rt/Rw 003/005	1021 0276/IPM/2019	

Selanjutnya dalam Berita Acara ini telah menyerahkan disebut **PIHAK KESATU** dan yang menerima disebut **PIHAK KEDUA** dan pada saat ini **PIHAK KESATU** telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Ijin Operasional Lembaga Madrasah Tahun 2019 kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan (SK) Ijin Operasional Lembaga Madrasah Tahun 2019 ini di buat oleh kedua belah pihak, adapun Surat Keputusan (SK) Ijin Operasional tersebut dalam keadaan baik, sejak penandatanganan berita acara ini. Berita acara ini dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU
Yang Menyerahkan

Hj. Marliyah, S. Pd
NIP. **197002012003122003**

PIHAK KEDUA
Yang Menerima

Nur Hasanah
NIP.